

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Keadaan geografis dan demografis Myanmar sebagai salah satu negara kedua terbesar di ASEAN setelah Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 60 juta jiwa, konstitusi nasional yang telah dibuat pada tahun 1947 dalam menetapkan sistem pemerintahan parlementer di Myanmar saat itu, membawa Myanmar berada di bawah pemerintahan sipil perdana menteri U Nu. Merupakan langkah yang dibangun untuk membuat Myanmar berjalan dalam koridor parlemen yang cenderung demokratis

Dalam upayanya U Nu membangun strategi *Pydawtha* (negara yang makmur) dalam menyelesaikan permasalahan di dalam negerinya. Namun strategi penerapan *Pydawtha* tersebut akhirnya mengalami kegagalan. Dibuktikan dengan tumbuhnya budaya korupsi pada jajaran pemerintah sehingga menimbulkan perang saudara dan pemberontakan etnis yang memberikan dampak kemacetan inflasi pada tahun 1950.

Pemerintahan militer Myanmar dimuali sejak kudeta yang dilakukan oleh Jendral Ne Win. Yang dimana munculnya sistem kekuatan militer di Myanmar mengubah sistem deomkrasi parlementer yang sudah dterapkan di Myanmar sejak merdeka dari Inggris 4 januari 1948. Pemerintah junta militer, mengambil alih semua aspek kehidupan yang ada di Myanmar baik dari segi pemerintahan, politik, dan ekonomi.

Kendali penuh junta militer dalam segala aspek kehidupan di Myanmar banyak merugikan masyarakat, seperti pelanggaran HAM yang dilakukan junta militer dan menangkap tokoh pro demokrasi akibat kemenangan partai oposisi di pemilu tahun 1990. Tindakan yang dilakukan oleh junta militer tersebut membuat dunia internasional marah kepada Myanmar dan menjatuhkan sanksi kepada pemerintahan seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Kekecewaan Aung San Suu Kyi terhadap tindakan junta militer, memutuskan untuk terjun ke dunia politik di Myanmar. Suu Kyi dianggap sebagai sosok yang paling cocok sebagai seorang pemimpin sekaligus simbol rakyat Myanmar. Jendral Aung San yang merupakan ayah Suu Kyi menjadi salah satu faktor yang menjadikan Suu Kyi sebagai simbol perjuangan rakyat Myanmar mencapai demokrasi.

Dibentuknya *State Development and Peace Council* (SDPC) sejak tahun 1997 semakin menunjukkan peran junta militer dalam politik di Myanmar, sebelumnya SDPC bernama *State Law and Order Restoration Council* (SLORC). Dibentuknya SLORC untuk memperbaiki kondisi politik di Myanmar, SLORC yang menjadi kaki tangan pemerintah junta militer belum menunjukkan tanda-tanda untuk merubah sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Bahkan kemenangan partai NLD di pemilu tahun 1990 tidak diakui oleh pemerintah junta militer, hal ini membuktikan bahwa pemerintah masih ingin mempertahankan kekuasaannya.

Di Myanmar terdapat beberapa partai seperti *National League for Democracy* (NLD) diketuai oleh Aung Shwe, sekretaris umum yaitu Aung San Suu Kyi, *National Unity Party* (NUP) diketuai oleh Tha Kyaw, *Shan Nationalities League for Democracy* (SNLD) diketuai oleh U Khun Tun Oo, dan beberapa partai kecil. Jika pada masa pemerintahan sebelumnya yakni Jendral Ne Win yang merupakan partai pemerintah adalah *Burma Socialist Programme Party* (BSPP), BSPP menjadi satu-satunya partai yang mendominasi pemerintahan. Sekarang ada kebebasan untuk mendirikan partai, maka partai NUP yang mendukung rezim pemerintahan sehingga bisa dikatakan partai NUP menjadi sarana buat rezim memperkuat kekuasaannya. Kekuatan junta militer Myanmar sampai sekarang masih sangat kuat, walau sistem pemerintahan tidak disukai oleh masyarakat.

Kemunculan Aung San Suu Kyi menggemparkan pada akhir tahun 1980-an menyita perhatian internasional. Karena keberaniannya menempatkan diri sebagai oposisi militer, menjadikan Suu Kyi menjadi simbol perjuangan rakyat

Myanmar. Di dalam struktur organisasi NLD Suu Kyi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, namanya lebih populer daripada Aung Gyi. Kemunculan pertamanya di Shwe Dagon Pagoda, disaat tengah gencarnya aksi protes rakyat melawan pemerintah. Kehadiran Suu Kyi waktu itu menarik bagi rakyat Myanmar. Masyarakat dianjurkan untuk bersatu dan menggunakan cara- cara yang damai dalam mencapai tujuan mereka, yaitu negara yang menganut sistem demokrasi.

Tanggal 8 November 2015 Myanmar menggelar pemilihan umum yang berlangsung secara terbuka pertama kalinya setelah dominasi junta militer yang hampir 50 tahun berkuasa. Berdasarkan hasil dari *Union Election Commission*, partai NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi mendapatkan perolehan suara lebih dari 80% dan memberikan kemenangan mutlak pada partai NLD yang sekaligus mengakhiri periode pemerintahan junta militer. Namun, meskipun partai Aung San Suu Kyi menang, Aung San Suu Kyi tidak diperbolehkan menjadi presiden karena dalam konstitusi Myanmar melarang siapa pun yang memiliki pasangan dan anak berkewarganegaraan asing untuk menjadi presiden.

Pasca kemenangan partai NLD pada pemilu tahun 2015 hubungan antara Aung San Suu Kyi beserta partainya dengan pihak junta militer terbilang baik dengan diterimanya hasil pemilu, dan junta militer menyatakan akan bekerjasama dengan pemerintahan sipil untuk berjalannya transisi demokrasi Myanmar.